

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 26 Januari 2011

Subyek : Bencana Alam

Hal : 01

MITIGASI BENCANA MERAPI Warga Sulit Direlokasi

Magelang, Kompas - Pemerintah Kabupaten Magelang di Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sleman di DI Yogyakarta sama-sama menyatakan, tak mudah dan harus berhati-hati merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi.

Kabupaten Magelang sudah menetapkan tujuh dusun rawan bencana, sedangkan Kabupaten Sleman masih menutup informasi dusun mana yang harus direlokasi karena berbagai pertimbangan.

Di Magelang, pemerintah telah menetapkan 24.960 keluarga atau 172.342 jiwa yang tinggal di 45 desa di enam kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana. Namun, sasaran utama relokasi di Magelang adalah warga di tujuh dusun di Kecamatan Salam. Ketujuh dusun itu berada di daerah aliran Kali Putih, yaitu Dusun Gempol di Desa Jumoyo serta enam dusun lain di Desa Sirahan, yaitu Salakan, Candi, Jetis, Gelagah, Sirahan, dan Gemampang.

Bupati Magelang Singgih Sanyoto di Magelang, Selasa (25/1), menjelaskan, ketujuh dusun tersebut saat ini tertimbun pasir setebal 3-4 meter. Dusun-dusun itu juga telah dikosongkan sejak beberapa minggu terakhir dan warganya mengungsi. "Namun, relokasi tak bisa serta-merta dilakukan. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu kesediaan masyarakat untuk direlokasi serta ada tidaknya tanah untuk relokasi," katanya. Apalagi pihaknya juga belum punya calon lokasi untuk merelokasi warga.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mendata daerah rawan banjir lahar dingin berada di radius 300 meter di daerah aliran 10 sungai yang berhulu di kawasan puncak Merapi. Dari 10 sungai itu yang paling berbahaya adalah Kali Putih. Tujuh dusun yang warganya diprioritaskan untuk direlokasi berada di daerah aliran kali Putih.

Di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meminta Pemkab Magelang segera menata ulang tata ruang di Kecamatan Salam, Muntilan, dan Mungkid.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jateng Priyantono Djarot Nugroho mengatakan, penataan ulang atas tata ruang di Kabupaten Magelang sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab Magelang dan masyarakat. "Desa-desa itu harus dikosongkan dan penduduknya direlokasi sesuai kesepakatan bersama. Pembangunan tembok penahan hanya efektif untuk jangka pendek," katanya.

Sleman hati-hati

Saat ini Pemkab Sleman masih mengolah rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta untuk menentukan kawasan di lereng Merapi dan di sekitar sungai yang berhulu di Merapi yang masih layak huni atau tidak.

Kepala Bagian Humas Pemkab Sleman Endah Sri Widiastuti mengatakan, Pemkab Sleman saat ini memprioritaskan penanganan pengungsi, mempercepat pembangunan hunian sementara, dan mengantisipasi lahar dingin Merapi.

Menurut Endah, BPPTK telah memaparkan ada 31 dusun terdampak Merapi sehingga ia mengimbau agar warga jangan membangun rumah permanen dulu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sleman Widi Sutikno menyatakan, menginformasikan kawasan yang tak lagi layak huni kepada warga tidak gampang. "Kami harus mengolah dulu semua masukan yang ada. Jangan terburu-buru," ujar Widi.

Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu menyatakan, persoalan relokasi sampai kini masih merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat.

Penataan ruang

Sinkron dengan kesulitan dua pemerintah daerah tersebut, di Bandung, Jawa Barat, Kepala Proyek Mitigation of Georisk Tahap III Republik Federal Jerman Matthias Dorn, dalam ceramahnya, mengemukakan, daerah rawan bencana di Indonesia harus memiliki rencana tata ruang yang tepat sebagai langkah mitigasi bencana dan penanggulangan bencana alam. Tata ruang yang tepat bisa menekan jatuhnya jumlah korban jiwa atau kerugian materi akibat bencana alam. "Salah satu yang harus mendapat perhatian adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah," kata Matthias Dorn, Selasa, dalam Workshop Perencanaan Mitigation of Georisk di Bandung. Proyek ini hasil kerja sama Pemerintah Federal Jerman dan Badan Geologi Kementerian ESDM.

Dorn menilai, sebenarnya arah mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia sudah berjalan di arah yang benar. Itu dibuktikan dengan penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Keduanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengambil langkah mandiri guna menangani masalah bencana alam. Akan tetapi, aplikasi di lapangan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, bersama Badan Geologi, pihaknya akan membantu pembuatan panduan rencana tata ruang di daerah rawan bencana.

(EGI/WHO/CHE/PRA/TOP)